

# KELOMPOK POST ISLAMISME PASCA REVOLUSI ISLAM IRAN 1979

Oleh : Gili Argenti

**FISIP, Prodi Ilmu Pemerintahan  
Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)  
Email : gili.argenti@fisip.unsika.ac.id**

## Abstrak

Negara Islam Iran telah menjadi salah satu kiblat dari Islam politik global, kemenangan rakyat Iran melalui Revolusi Islam tahun 1979 telah banyak menginspirasi kelompok Islam Suni dan Islam Syi'ah di dunia Islam sampai tahun 1990-an. Semangat Revolusi Iran dalam menghancurkan belenggu penindasan dari rezim tirani pro barat seakan menjadi mitos bagi gerakan-gerakan perlawanan Islam dipenjuru dunia sampai sekarang. Tetapi, perkembangan terakhir di Iran merubah peta Islam politik dunia, kemunculan kelompok reformis yang berjarak dengan generasi 1970-an, membawa wajah baru panggung politik nasional di Iran sampai sekarang. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan yang mencoba menjelaskan awal mula kemunculan kelompok reformis atau Post Islamisme di negara para Mullah Iran.

Kata kunci : Revolusi Islam, Islam Politik dan Post Islamisme

## Pendahuluan

Post Islamisme merupakan terminologi baru untuk menggambarkan sebuah fenomena dalam gerakan Islam politik, berupa keikutsertaan serta berpartisipasi ke dalam sistem politik modern, yang sebelumnya mereka anggap sebagai sistem politik yang tidak Islami. Partisipasi politik mereka dalam politik modern itu berupa peningkatan hak suara dalam pemilu, afiliasi terhadap partai politik tertentu, bahkan bisa pula membentuk partai politik baru. Artinya telah terjadi perubahan paradigma dan gerakan politik Islam dikalangan umat Islam, dari garis keras, militan, eksklusif, dogmatis, ke arah paradigma dan gerakan yang menghargai inklusivitas, pluralitas dan toleransi.

Post Islamisme berbeda dengan Islamisme, untuk yang kedua senantiasa mengaitkan kemunduran dunia Islam saat ini dengan kurangnya komitmen menjalankan ajaran Islam secara ketat, dalam hal ini kalangan Islamis melihat Islam sebagai sebuah ideologi dan basis gerakan untuk melakukan reformasi masyarakat secara menyeluruh, dengan menolak nilai-nilai dunia barat, serta memperjuangkan formalisasi syari'at Islam dalam kehidupan bernegara.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Bassam Tibi,<sup>2</sup> terdapat isu-isu mendasar yang selalu diusung kelompok Islamisme. *Pertama*, interpretasi Islam sebagai sistem tatanan negara. *Kedua*, persepsi akan Yahudi sebagai musuh utama yang berkonspirasi melawan Islam. *Ketiga*, evolusi dari jihad klasik ke jihadisme teroris. *Keempat*, kemurniaan pandangan Islam akan penolakan atas sekulerisme.

Post Islamisme merupakan antitesis wacana Islamisme, paradigma kelompok moderat ini memiliki prinsip melakukan reformasi bidang ekonomi dan demokrasi, tanpa mengubah dasar ideologi negara, dengan tetap mengakui dan menghormati nilai-nilai keragaman bernegara.

<sup>1</sup> Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit Mason, *PKS dan Kembarannya : Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. (Jakarta : Komunitas Bambu, 2012) Hal 73-74.

<sup>2</sup> Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*. (Bandung : Mizan, 2016) Hal 7

Isu formalisasi syari'at Islam nyaris tidak digaungkan sebagai prinsip perjuangan politik, kelompok Post Islamisme menawarkan isu politik yang lebih populis seperti perbaikan pelayanan publik, anti korupsi, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesetaraan gender.

Menurut Asef Bayat, Post Islamisme bercirikan serangkaian gerakan sosial dan intelektual yang digerakan oleh generasi muda, mahasiswa, perempuan dan intelektual agama, dengan mengkompromikan iman dengan kebebasan, agama dan HAM, atau mentransendenkan pemerintahan Islam dengan mensyaratkan adanya kebebasan atas pilihan individu, pluralisme dan etika agama.<sup>3</sup>

Bagi Asef Bayat,<sup>4</sup> gerakan post Islamisme berawal dari gerakan reformasi di negara Islam Iran, seiring kemenangan kelompok reformasi di bawah Presiden Khatami. Gerakan post Islamisme di Iran ditunjukkan dengan trend terbukanya ruang publik kota yang bebas dan modern, pembentukan karakter kota ditunjukkan estetika baru dengan konfigurasi ruang, simbolisasi komersialisme yang besar dan mall-mall menyerupai kota Madrid atau Los Angeles. Slogan-slogan Revolusi Islam yang sebelumnya mendominasi hiasan kota, tergantikan dengan poster-poster bersifat komersil, dipusat kota juga didirikan pusat-pusat budaya yang menyediakan kesenian-kesenian, musik dan teknologi modern.

Selain terbukanya ruang publik kota, gerakan Post Islamisme banyak digerakan oleh para pemuda dan mahasiswa, mereka mengasosiasikan diri dengan sifat idealisme, individualisme dan spontanitas, dengan menciptakan model pemahaman keberagamaan yang komprehensif antara iman, kebebasan dan kesenangan. Dalam gerakan Post Islamisme kaum muda ini menuntut kembalinya spirit kepemudaan yang dipadu perjuangan menegakkan agama Islam bersifat terbuka yang beriringan dengan cita-cita demokrasi.<sup>5</sup> Para pemuda Post Islamisme menunjukkan keyakinan agama dan rasa keberagamaan yang kuat, mereka tidak meninggalkan agama, tetapi mereka menempa diri dengan sub kultur keberagamaan baru, menganut yang sakral dan sekuler, keimanan dan kesenangan, ketuhanan dan hiburan.<sup>6</sup>

Gerakan Post Islamisme, juga banyak didukung kalangan perempuan, diantara fokus aktifisme kelompok perempuan ini ialah memenuhi kebutuhan finansial dengan mencari pekerjaan dalam bentuk ekonomi *cash*, kebanyakan mereka memilih bekerja di luar rumah mengisi ruang-ruang publik, beragam profesi yang mereka jalankan dari seniman sampai penulis.<sup>7</sup>

Terkhir, Post Islamisme banyak disuarakan oleh kelompok intelektual agama, kelompok ini banyak menghidupkan pemikiran agama dan praktik demokrasi, dengan menghormati nalar dan menghargai kebebasan, para intelektual agama mendukung orientasi-orientasi umum, mereka tidak lagi menyalahkan permasalahan bangsa kepada kekuatan asing dan imperialisme barat. Keterbelakangan bangsa, bagi mereka yakini berasal dari dalam diri sendiri, fokus gerakan mereka pada cita-cita pelembagaan kebebasan dan demokrasi di masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Asef Bayat dalam studi Post Islamismenya, pertanyaan apakah Islam sesuai dengan demokrasi adalah keliru dan tidak relevan. Baginya, persoalan bukan terletak pada sesuai tidaknya Islam dan demokrasi, tetapi bagaimana proses adaptasi yang dilakukan oleh umat Islam sehingga ide demokrasi bersesuaian dengan realitas umat yang ada, sehingga pandangan dunia kaum Islamis tidak serta-merta menolak demokrasi.

Dari paparan diatas tentang post Islamisme dapat disimpulkan beberapa point, diantaranya : *Pertama*, bersikap pragmatis, realistis, serta kesediaannya untuk berdamai dengan realitas politik

<sup>3</sup> Asef Bayat, *Pos Islamisme*. (Yogyakarta : LkiS, 2011) Hal 98.

<sup>4</sup> Ibid Hal 98.

<sup>5</sup> Ibid Hal 105

<sup>6</sup> Ibid Hal 110.

<sup>7</sup> Ibid Hal 135-138.

<sup>8</sup> Ibid Hal 159.

yang ada saat ini, realitas yang tak sepenuhnya ideal dan sebangun dengan cita-cita ideologis. Post-Islamisme sama sekali tidak sekular, bahkan tetap menunjukkan sentimen negatif kepada setiap bentuk sekularisme, tetapi dia juga menolak teokrasi dan penerapan platform ideologis-keagamaan. *Kedua*, kecenderungan yang kompromistik dengan kenyataan politik. Adanya proses adaptasi yang mendorong beberapa gerakan Islamis mampu menjadi kekuatan alternatif bagi permasalahan demokratisasi di negara-negara muslim.

Tulisan ini menjelaskan kemunculan kelompok baru di negara Islam Iran pasca kemenangan Revolusi Islam Iran. Kemunculan mereka menjadi kajian menarik sampai saat ini, mengingat spirit yang mereka bawa menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok Islam politik di negara Islam lain, kelompok yang menerima demokrasi liberalisme dari barat sebagai sistem nilai bisa beriringan dengan Islam, mereka tidak menjauhi bahkan memusuhinya. Dalam peta politik Iran kelompok ini sering disebut sebagai kelompok reformis, tetapi dalam teori Islam politik mereka dilabeli sebagai kelompok Post Islamisme. Tulisan ini membatasi kajian dari mulai Revolusi Iran 1979 sampai munculnya figur Muhammad Khatami, salah satu tokoh panutan generasi Post Islamisme Iran.

Revolusi Islam Iran tahun 1979 telah mengguncang dunia, bahkan telah membongkar mitos teori-teori sosial Barat yang selama ini menempatkan agama sebagai faktor marginal serta penghambat perubahan dan kemajuan, bahkan pemikir sekaliber Karl Marx menempatkan kepercayaan akan Tuhan ini, sebagai candu yang membius kaum buruh untuk bersifat fantalis sehingga terasing dari eksistensi sosialnya.<sup>9</sup>

Seorang Amien Rais melukiskan bahwa revolusi 1979 telah membuat iri hati para intelektual marxis, karena model revolusi Iran yang melibatkan jutaan rakyat turun ke jalan itu tidak terjadi di negara-negara mereka (komunis), yang pada umumnya model revolusi mereka hanya letupan-letupan kecil bahkan terkadang hanya melibatkan sekelompok elit partai komunis.<sup>10</sup>

Revolusi Iran tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang penanaman ideologisasi Islam yang disosialisasikan kalangan ulama (*mullah*) secara terus menerus. Indoktrinasi ideologis tersebut akhirnya memetik hasilnya dengan tumbangannya rezim Shah Reza Pahlevi. Bentuk negara berbentuk republik Islam kemudian muncul sebagai antitesis sistem yang menindas dan pro sekulerisme Barat, dengan konsep demokrasi Islamnya (*Vilayat I Faqih*)<sup>11</sup> para ideolog revolusi memformat sistem kenegaraan baru serta unik, yang sebelumnya tidak pernah diadopsi oleh negara manapun.

*Vilayat I Faqih* ialah konsep kepemimpinan yang diserahkan pada seorang yang dianggap menguasai bidang agama dan hukum Islam, sang pemimpin harus adil dalam menjalankan tugas wewenangnya, tugas kepemimpinan ini hanya bisa diemban oleh seorang *faqih* yang terpilih, rakyat Iran harus taat kepada sang *faqih* seperti ketaatan mereka terhadap imam keduabelas yang menurut ajaran Islam Syi'ah sebagai ratu adil yang akan muncul diakhir zaman nanti.<sup>12</sup> Menurut Ayatullah Khomeini ada empat prinsip dasar yang harus ditegakan dalam konsep *Vilayat I Faqih*. *Pertama*, Allah SWT ialah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya, Allah penguasa tunggal bagi umat Islam dan Dia-lah pemilik kedaulatan yang sah.

*Kedua*, kepemimpinan manusia yang mewujudkan kepemimpinan Allah di muka bumi ialah *kenabian* dengan peraturan Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para Nabi, jadi para Nabi yang menyebarkan serta melaksanakan hukum Tuhan saja. *Ketiga*, *Imamah* menunjukkan garis kelanjutan dari para Nabi dalam memimpin umat, untuk melanjutkan kepemimpinan *Ilahiyah* diperlukan adanya manusia-manusia suci yang *faqih* tentang syariat Islam. *Keempat*, pada saat *Imamah* masih dalam keadaan ghaib, maka

<sup>9</sup> John C. Raines (editor), *Marx Tentang Agama*. (Jakarta : Teraju, 2003).

<sup>10</sup> Amien Rais (penerj), Dr. Ali Syar'ati, *Tugas Intelektual Muslim*. (Yogyakarta : Shalahudin Press, 1995)

<sup>11</sup> Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran Dam Realisasi Vilayat I Faqih*. (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2004)

<sup>12</sup> Ibid 88.

kepemimpinan umat dilanjutkan oleh para *faqih*. Fuqaha adalah pengganti Imam, maka pada mereka dipercayakan kepemimpinan atas umat.<sup>13</sup>

Sehingga inti *Vilayat I Faqih* bahwa umat Islam Syi'ah (rakyat Iran) selama menunggu *Imamah* yang akan datang pada akhir zaman, maka harus ada seseorang yang akan menggantikan sementara posisi sang *Imamah* sebagai pemimpin umat Islam, sang pengganti itu harus seseorang orang yang shaleh dan mengerti urusan keagamaan dan kenegaraan. Oleh Khomeini konsep *Vilayat I Faqih* dilembagakan dalam hirarkis kelembagaan politik Iran dalam wujud Pemimpin Tertinggi, sebuah institusi politik tertinggi yang mengawasi lembaga-lembaga politik lainnya seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Seperti umumnya revolusi sosial yang terjadi dibelahan dunia lain harus ada institusi politik yang menjaga jalannya revolusi, di Iran institusi Pemimpin Tertinggi Revolusi bekerja untuk memenuhi fungsi tersebut, ia menjadi penentu akhir dari setiap keputusan politik yang akan diambil oleh lembaga-lembaga politik lainnya, sehingga kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah nantinya tidak melenceng dari cita-cita luhur revolusi. Imam Khomeini menjadi orang pertama yang menduduki posisi sebagai Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, pada masa kepemimpinannya negara para mullah ini melakukan perubahan besar-besaran, selain melakukan penangkapan serta menghukum mati orang-orang yang dianggap pendukung rezim masa lalu, Khomeini membentuk lembaga-lembaga politik baru seperti Dewan Pengawal yang terdiri dari enam orang mullah dan enam orang ahli hukum yang bertugas mengawasi proses legislasi di Majelis (legislatif), sehingga lembaga ini mempunyai otoritas mendukung atau menentang setiap keputusan di Majelis. Dewan Pengawal juga berkuasa *mendiskualifikasi* calon-calon presiden maupun calon-calon anggota Majelis yang dianggap tidak loyal terhadap revolusi 1979.<sup>14</sup>

Kebijakan Pemimpin Tertinggi Revolusi serta Dewan Pengawal ternyata tidak selamanya mendapat dukungan rakyat Iran, pada dekade tahun 1980-an benih-benih ketidakpuasan atas jalannya roda pemerintahan bermunculan, tokoh-tokoh revolusi yang sebelumnya berdiri dibelakang konsep *Vilayat I Faqih* mulai mempertanyakan dominasi yang terlalu kuat institusi Pemimpin Tertinggi Revolusi terhadap lembaga-lembaga politik lain. Sehingga proses politik yang terjadi tidak sehat terkesan tertutup dan otoriter, bahkan bila diukur menggunakan teori politik Barat, posisi Pemimpin Tertinggi dengan kekuasaan yang mutlak tersebut sudah tentu bertentangan dengan logika demokrasi yang sangat menentang sentralisasi kekuasaan ada di tangan satu orang penguasa.

Salah satu tokoh pertama yang menggugat pemerintahan revolusi ialah Ayatullah Kazem Shari'atmadari, ia berpendapat bahwa revolusi hanya sebuah alat untuk menghancurkan reziem diktaktor dan menggantikannya dengan pemerintah demokrasi yang berasaskan prinsip-prinsip Islam, Shari'atmadari menekankan pentingnya peran rakyat dalam demokrasi Islam, karenanya menentang kekuasaan berlebihan tanpa batas yang dimiliki oleh para mullah menjadi suatu keniscayaan.

Dalam pandangannya pemerintah demokratis seharusnya memberi kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam politik, sedangkan posisi para ulama sebatas pemberi nasihat, arahan dan petunjuk bukan sebagai penentu.<sup>15</sup> Tokoh berikutnya Ayatullah Montazeri yang berpendapat reziem mullah terlalu banyak campur tangan dalam urusan masyarakat, bahkan bertindak brutal terhadap orang atau kelompok yang mereka pandang sebagai musuh Islam, yang sesungguhnya tidak lain dari sekedar kelompok yang kecewa yang menunjukkan oposisi mereka terhadap reziem yang semakin represif.<sup>16</sup> Tentu saja pemerintah para mullah tidak

<sup>13</sup> Ibid 88-89.

<sup>14</sup> Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran : Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004) Hal 18.

<sup>15</sup> Ibid Hal 3.

<sup>16</sup> Ibid Hal 5

tinggal diam, dua tokoh oposisi ini mengalami tekanan-tekanan secara fisik dan psikis, bahkan Montazeri mengalami penahanan rumah selama bertahun-tahun.

Gerakan menuntut perubahan di dalam sistem pemerintahan Islam Iran tidak berhenti dengan ditahannya beberapa tokoh pembaharu, pada tahun 1990-an gerakan oposisi ini semakin menguat keberadaannya, terutama di beberapa kota besar di Iran, gerakan pembaharuan yang mendapat dukungan penuh dari kaum muda (mahasiswa) semakin berani menyuarakan tuntutan, tokoh karismatik Muhammad Khatami menjadi *icon* baru dari kalangan reformis, sebagai tokoh pemerintah yang sangat mendukung adanya proses demokratisasi dan reformasi. Pertarungan kaum pembaharu dengan konservatif mencapai puncaknya pada pemilihan langsung Presiden Iran, Muhammad Khatami bersaing keras dengan Ali Akbar Nateq Nouri tokoh yang di dukung kalangan anti reformasi.

Pada tanggal 23 Mei 1997 menjadi saksi kemenangan Khatami dalam Pemilihan Umum Presiden Iran, ratusan ribu kaum muda Iran turun ke jalan merayakan kemenangan tokoh reformasi mereka, aksi kolosal kaum muda itu, mengingatkan dunia internasional pada peristiwa besar dua puluh tahun sebelumnya yaitu Revolusi Islam 1979, sehingga banyak para pengamat politik timur tengah menilai sedang terjadi revolusi jilid kedua di negeri para mullah tersebut. Slogan toleransi, modernisasi dan keterbukaan dalam kampanye Muhammad Khatami mampu menarik pemilih dari kalangan kaum muda Iran yang berjumlah lebih dari 70% dari populasi penduduk Iran untuk menyalurkan pilihannya pada Khatami.

Fenomena kemenangan Khatami menunjukkan pada kita bahwa rakyat Iran sudah jenuh dengan sistem otoriter yang di dominasi oleh kalangan agamawan, mereka menginginkan demokratisasi dan keterbukaan.

Peristiwa perubahan politik di Iran sangat menarik untuk diangkat dalam tulisan ini, penulis ingin mengetahui sejauhmana proses demokratisasi atau keterbukaan politik di Iran pasca revolusi. Sistem politik Iran pasca revolusi 1979 merupakan jawaban dari permasalahan multidimensional atas diterapkannya sistem pemerintahan yang pro barat, sekuler dan tiran. Konsep pemerintahan *Vilayat I Faqih* yang dirumuskan Ayatullah Khomeini merupakan koreksi total dari sistem pemerintahan sebelumnya.

Tetapi dua puluh tahun kemudian sistem politik yang dirumuskan para ideolog revolusi Islam ini mengalami degradasi dan dipertanyakan relevansinya dengan situasi Iran yang sudah berubah.

Dari narasi singkat tentang proses transformasi politik di Iran mulai dari revolusi tahun 1979 sampai pasca revolusi dengan banyaknya gugatan terhadap sistem demokrasi Islam yang dikembangkan oleh Imam Khomeini. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana proses awal mulai terjadinya pergeseran paradigma rakyat Iran (khususnya generasi muda) terhadap sistem politik Islam yang dilembagakan dalam *Vilayat I Faqih* ? (2) Bagaimana respon kalangan konservatif terhadap tuntutan perubahan liberalisasi sistem politik Iran? (3) Dan bagaimana kaum pembaharu (reformis) meregulasikan tuntutannya dalam kebijakan pemerintahan?

## **Kerangka Teori**

Studi-studi tentang perkembangan politik global sekitar satu dekade terakhir menunjukkan bahwa arus demokratisasi atau tuntutan akan liberalisasi sistem politik saat ini merupakan sebuah trend global, secara global proses demokratisasi berlangsung di antara bangsa-bangsa di dunia.<sup>17</sup> Menurut Samuel P. Huntington tuntutan liberalisasi politik ini bisa berlangsung dalam empat skenario. Skenario pertama adalah *transformasi*, yakni proses liberalisasi sistem

---

<sup>17</sup> Ibid Hal xxxvi.

politik yang diinisiatifi, dimotori dan dikendalikan dari atas, dari penguasa dalam skenario ini, keterbukaan sistem politik terjadi sebagai konsekuensi terjadinya perubahan dalam rezim berupa pemihakan terhadap proses demokratisasi.

Skenario kedua adalah *replacement*, yakni liberalisasi politik terjadi melalui runtuhnya runtuhnya rezim lama dan digantikan oleh rezim baru yang pro demokrasi, dalam skenario ini demokratisasi sistem politik dimotori oleh kaum oposisi diluar sistem pemerintahan. Skenario ketiga adalah *transplacement*, yakni proses liberalisasi sistem politik sebagai kombinasi antara gerakan sosial diluar rezim yang kuat serta adanya faksi-faksi prodemokrasi dalam negara. Skenario keempat adalah *intervensi*, yakni proses liberalisasi politik yang dihasilkan oleh intervensi pihak luar asing dengan menjatuhkan rezim lama yang otoritarian.<sup>18</sup>

## Revolusi Islam Iran 1979

Untuk memahami revolusi Iran yang dipelopori Ayatullah Khomeini, kita harus memahami bahwa revolusi Iran tidak sama dengan revolusi sosial yang terjadi sebelumnya di belahan dunia lain, revolusi Iran tidak bisa dipahami sebatas adanya pengalihan kekuasaan politik secara paksa dari tangan aristokrasi kepada sebuah hirarki politik baru.

Revolusi Islam Iran menurut Roger Garaudy,<sup>19</sup> merupakan revolusi ekonomi, politik serta agama yang diarahkan untuk melawan semua konsep manusia dan peradaban yang muncul di dunia barat selama berabad-abad. Revolusi Iran didasarkan atas prinsip-prinsip radikal yang berbeda, untuk melakukan koreksi habis-habisan terhadap konsepsi sekuleris barat, bagi para ideolog revolusi Iran, bahwa Islam yang diwahyukan pada seorang manusia bernama Muhammad harus dipahami sebagai konsep *holistik* yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, Islam tidak bisa dipahami sebatas konteks keyakinan akan transedensi ketuhanan Ilahiyah semata, tetapi harus dipahami sebagai sebuah ideologi politik yang mengatur tata pemerintahan suatu negara.

Revolusi Iran telah meruntuhkan tesis tentang ketidakmampuan kaum agamawan dalam mengatasi problem-problem sosial politik, agama telah menjadi inspirasi perlawanan baru,<sup>20</sup> menggeser konsep perjuangan kelas marxian, yang selama ini mengklaim diri sebagai satu-satunya penggerak gerakan revolusi.

Maka setelah revolusi Iran berhasil mendongkel kekuasaan Reza Pahlevi, para tokoh ulama (mullah) menetapkan konstitusi Islam Syi'ah sebagai ideologi yang harus ditetapkan dalam kehidupan sosial politik di negeri Iran. Imam Khomeini segera membentuk lembaga politik tertinggi sebagai satu-satunya institusi yang paling dominan, yaitu Lembaga Pemimpin Tertinggi (*rahbah*) yang membawahi lembaga-lembaga politik lainnya (eksekutif, legislatif dan yudikatif), sehingga akibat dominasi mutlak tersebut menjadikan otoritas politik lembaga *rahbah* menjadi penentu utama dalam percaturan politik Iran, kekuasaan tersentralisasi pada seorang penguasa agama sekaligus politik, sistem politik ini sangat tidak lazim dalam kehidupan politik negara lain, terutama negara yang mengadopsi demokrasi barat sebagai sistem politiknya.

Kemudian Imam Khomeini diangkat menjadi pemimpin tertinggi spiritual pertama yang menjadikan dirinya sebagai penentu akhir dari setiap keputusan dan penyelesaian konflik politik yang muncul dari berbagai lembaga yang berada dibawahnya. Sebagai seorang *the supreme leader*, Khomeini menempati posisi yang sangat istimewa karena tidak ada kekuasaan lain yang dapat melampaui wewenangnya, bahkan konstitusi sekalipun.

<sup>18</sup> Ibid Hal xxxvii-xxxviii.

<sup>19</sup> Roger Garaudy, *Demi Kaum Tertindas : Akar Revolusi Islam di Iran*. (Jakarta : Penerbit Citra, 2000).

<sup>20</sup> Eko Prasetyo, *Islam Kiri : Jalan Menuju Revolusi Sosial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004).

Begitu kuatnya posisi pemimpin tertinggi, seorang Imam dapat mendorong seseorang ke dalam posisi menentukan atau menjatuhkannya tanpa dapat dicegah oleh hukum, karena kata-kata sang Imam lebih kuat dari hukum manapun. Sebaliknya, jika Khomeini mendukung seseorang, maka nyaris tidak ada seorangpun diseluruh pemerintahan Iran yang berani menentangnya.<sup>21</sup>

### **Institusi-Institusi Politik Iran Pasca Revolusi**

Selain pemimpin tertinggi revolusi, negara para mullah ini memiliki beberapa institusi politik yang memiliki kedudukan strategis, walaupun masih dibawah pengawasan sang Imam, institusi-institusi politik ini tetap menjadi primadona rebutan faksi-faksi politik yang saling berebut, untuk bisa menancapkan pengaruh politiknya.

Institusi pertama ialah *dewan pengawal*, dewan yang terdiri dari enam mullah dan enam ahli hukum ini dibentuk langsung oleh pemimpin tertinggi revolusi, dewan pengawal berfungsi *mendiskualifikasi* para calon anggota parlemen dan calon presiden yang dianggap tidak loyal pada revolusi Islam, dari otoritas yang diberikan sang Imam pada dewan pengawal ini memberikan posisi yang kuat bagi dewan pengawal dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak atau tidak untuk duduk dalam pemerintahan.

Selain memiliki wewenang dalam menetapkan calon anggota legislatif dan presiden, dewan pengawal dapat melakukan intervensi pada tahap perhitungan suara pada pemilihan umum, dengan bantuan pasukan keamanan mereka dapat memaksa agar hasil pemilihan di suatu daerah sesuai dengan kehendak mereka.<sup>22</sup> Tidak cukup sampai disitu, dewan pengawal diberi hak untuk mengawasi proses legislatif di parlemen (Majlis), sehingga mereka berhak mendukung atau menentang setiap keputusan Dewan Majlis.

Institusi kedua ialah parlemen (Majlis Syuro), satu dari institusi utama republik Islam Iran, dalam sistem politik Iran kedudukan parlemen sangat penting, secara konstitusional parlemen diposisikan sebagai lembaga politik negara yang bersifat *independent* dan berfungsi mengawasi jalannya eksekutif (Presiden), tetapi konstitusi juga menulis bahwa Dewan Pengawal dapat menganulir keputusan parlemen, praktis posisi legislatif sesungguhnya lemah dihadapan Dewan Pengawal yang selalu didominasi kalangan garis keras.<sup>23</sup>

Sedangkan institusi lain seperti Kementerian Kehakiman, *Pasdaran* (Pengawal Revolusi), *Basij* dan aparat keamanan (termasuk didalamnya polisi moral) adalah badan-badan yang menjalankan tugas *law enforcement* dan umumnya menjadi pendukung setia Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, bahkan untuk lembaga yudikatif rezim para mullah membentuk badan khusus untuk menangani para ulama yang melawan setiap kebijakan pemerintah. Lembaga yudikatif ini dengan mudah melemparkan para ulama yang kritis ke dalam penjara, dengan proses pengadilan penuh rekayasa.<sup>24</sup>

### **Dinamika Politik Iran Pasca Revolusi**

Setelah revolusi 1979 di Republik Islam Iran hanya mengenal satu sistem kepartaian, partai penguasa yang bernama PRI (Partai Republik Islam) menjadi partai terbesar dalam sejarah politik negara para mullah tersebut, namun meskipun menganut sistem satu partai, PRI tidak terbebas dari perbedaan pendapat diantara kelompok-kelompok didalamnya.

---

<sup>21</sup> Bambang Cipto Hal 12

<sup>22</sup> Bambang Cipto Hal 16

<sup>23</sup> Bambang Cipto Hal 17

<sup>24</sup> Bambang Cipto Hal 20

Sebelum kemunculan kaum reformis, di Iran hanya ada dua kekuatan yang bertarung dalam memperebutkan posisi-posisi jabatan politik, yaitu antara kelompok kiri Islam dan kaum konservatif, kedua kelompok inilah yang mendominasi pertarungan politik dalam tubuh PRI.

Kelompok kiri Islam ialah kelompok yang menggunakan analisa sosialis dalam menjawab setiap problem sosial politik, mereka mensintesisakan teologi Islam dengan konsep perjuangan kelas marxian,<sup>25</sup> kelompok kiri Islam sangat dekat dengan Khomeini, tokoh Muhammad Khatami yang kemudian hari menjadi simbol gerakan reformasi di Iran, awalnya berasal dari kelompok ini. Sedangkan kelompok konservatif ialah kelompok politik yang sangat setia dengan doktrin *Vilayat I Faqih*, mereka menjadi sebuah kelompok yang cukup ditakuti, karena tindakannya selalu di dukung penuh lembaga-lembaga tinggi negara yang dikuasainya guna mengamankan jalannya revolusi.

Setelah meninggalnya Khomeini kelompok konservatif berhasil menyingkirkan kaum kiri Islam, mereka memandang kiri Islam sebagai kelompok yang kurang Islami, karena mengadopsi keyakinan sosialis dalam gerakannya. Tersingkirnya kiri Islam semakin mengkokohkan kalangan konservatif sebagai satu-satunya pihak yang menguasai pemerintahan, hampir semua pos-pos penting dipemerintahan dikuasai kalangan ini, yang cukup menarik Muhammad Khatami yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan tidak tergeser posisinya, karena Presiden Rafsanjani (berasal dari kelompok pragmatis) masih mempertahankan dirinya, sebagai penyeimbang dari menguatnya kalangan konservatif dimasa akhir kekuasaanya.

### **Kebijakan Reformasi Muhammad Khatami**

Sosok Muhammad Khatami sangat berbeda dengan para mullah yang lain, Khatami tidak terlibat langsung dengan pergolakan politik ketika revolusi Islam 1979, saat itu Khatami bermukim di Jerman bekerja sebagai Direktur Pusat Studi Islam di Hamburg. Kehidupannya demokratis di Jerman memang telah membentuk jalan pikiran intelektual Khatami yang moderat.<sup>26</sup> Pasca revolusi, pemimpin tertinggi Ayatullah Khomeini mengajak Khatami masuk ke dalam pemerintahan revolusi, jabatan pertamanya sebagai editor berita harian *Kayhan*, sebuah surat kabar yang langsung dibawah kendali Khomeini, sejak awal Khomeini sadar bahwa pemerintahan pasca revolusi memerlukan beberapa wajah moderat, karena umumnya para mullah pendukung revolusi berhaluan konservatif.

Pada tahun 1983 bersamaan dengan proses Islamisasi besar-besaran oleh pemerintah Iran, Khatami diangkat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pembinaan Islam, selama Khatami menjabat berbagai kebijakan pembaharuan dihasilkan oleh departemen yang dipimpinnya. Muhammad Khatami secara pelan-pelan menebarkan benih-benih demokrasi ditengah kehidupan masyarakat Islam Iran dengan membuka kran impor film-film asing serta mendorong penerbitan buku dan surat kabar. Sudah tentu kebijakan pintu terbuka ini membuat kalangan konservatif risau, mereka tidak bisa menerima gagasan-gagasan liberal Khatami yang dianggap bisa membahayakan revolusi Iran. Namun, dukungan kuat dari Khomeini membuat golongan konservatif tidak bisa berbuat banyak, kecuali melontarkan kritik-kritik yang pedas terhadap anak kesayangan pemimpin revolusi tersebut.

<sup>25</sup> Muhidin M Dahlan, *Sosialisme Religius : Suatu Jalan Keempat?* (Yogyakarta : Kreasi Wacana 2001).

<sup>26</sup> Bambang Cipto Hal 45

Akan tetapi, sejak Khomeini wafat, golongan konservatif mulai meningkatkan tekanan kepada Presiden Rafsanjani untuk memecat Khatami, pada awalnya Rafsanjani mempertahankan Khatami sebagai menternya, tetapi seiring tekanan kaum konservatif yang terus meningkat eskalasinya, akhirnya membuat Khatami terpeleceh dari jabatan Menteri Kebudayaan dan Pembinaan Islam yang telah dipegangnya.<sup>27</sup> Setelah melepas jabatan Menteri, Muhammad Khatami bekerja sebagai Direktur Perpustakaan Nasional, ide-ide pembaharuan terus ia kampanyekan melalui beberapa buku yang ditulisnya, dalam salah satu bukunya Khatami berusaha menyakinkan kaum muslimin Iran agar meninggalkan cara-cara berpikir kuno dan mengajurkan untuk meningkatkan logika penalaran dalam menjawab tantangan zaman.

Namun, yang paling menarik dalam bukunya, ketika Khatami mengkritik pemerintah Iran, ia mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi liberal, menekankan perlunya sebuah konsensus dan perjanjian antara penguasa dan rakyat, bagi Khatami pemerintah Islam yang baik adalah pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat, Khatami mengakui demokrasi liberal mempunyai kelemahan, namun kelebihanya tidak sedikit yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Khatami juga secara terbuka menyatakan bahwa rakyat Iran berhak untuk menterjemahkan *Vilayat I Faqih* sesuai dengan perkembangan zaman dan rakyat Iran hendaknya mengambil manfaat dari apa-apa yang berasal dari dunia barat. Berbekal pada pikiran dasar perlunya perubahan inilah Khatami memberanikan diri maju dalam kampanye presiden tahun 1997.<sup>28</sup>

### Para Pendukung Reformasi

Pemilihan umum untuk memilih Presiden di Iran yang diselenggarakan Jumat 23 Maret 1997 mengejutkan dunia internasional, pemilu yang dimenangkan oleh kandidat dari kubu reformis Muhammad Khatami, menjadi peristiwa fenomenal dalam sejarah politik Iran, peristiwa ini hampir sama dengan kejadian kurang lebih dua dekade sebelumnya, ketika jutaan pemuda pemudi Iran turun ke jalan menyerukan revolusi, bedanya pemuda pemudi yang mendukung Khatami tidak lagi menyerukan pemberontakan di jalan-jalan dalam mengartikulasi tuntutan mereka menuntut keterbukaan sistem dan demokratisasi lewat revolusi kertas suara di bilik-bilik suara.

Muhammad Khatami memperoleh dukungan yang sangat besar dari rakyat Iran, sehingga memenangkan pemilihan umum pada tahun 1997 dan 2001, ia menjabat dua periode sebagai Presiden, pertanyaannya kemudian siapakah para pendukung gerakan reformasi, yang telah mengantarkan seorang Muhammad Khatami ke kursi kepresidenan, mengingat rezim para mullah selama kurang lebih delapan belas tahun lamanya menyuntikan kesadaran revolusioner lewat media-media propaganda serta mimbar-mimbar khotbah jum'at pada setiap generasi yang baru lahir pasca revolusi 1979.

Menurut Musthafa Abd. Rahman,<sup>29</sup> ada dua faktor yang mendukung kemunculan generasi baru dalam masyarakat Iran yang menimbulkan pergeseran orientasi dari jargon revolusi ke orientasi demokratisasi. *Pertama*, telah terjadi kesenjangan antargenerasi setelah revolusi Iran berusia hampir dua dekade, dalam cara hidup, berinteraksi dengan lingkungannya baik regional atau internasional, bahkan dalam menginterpretasi revolusi itu sendiri dengan segala pilar-pilarnya. *Kedua*, pengaruh imbas perubahan yang berhembus di seluruh dunia

---

<sup>27</sup> Bambang Cipto Hal 47

<sup>28</sup> Bambang Cipto Hal 48

<sup>29</sup> Musthafa Abd. Rahman, *Iran Pasca Revolusi : Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*. (Jakarta : Buku Kompas, 2003) Hal 36.

yang ditandai dengan ambruknya imperium Uni Soviet dan robohnya tembok Berlin, menggeliat menyentuh bagian dunia lain, termasuk timur tengah.

Negara Iran tentu tidak luput dari imbas pergeseran yang terjadi dilingkungan internasionalnya tersebut. Generasi pendukung reformasi ini, mereka yang lahir pada saat revolusi berlangsung, atau mereka yang baru berusia tiga hingga lima tahun di saat revolusi 1979. Mereka tumbuh berkembang dan mencapai usia dewasa di era kemenangan revolusi, sebuah generasi yang tidak pernah mengalami penindasan politik rezim Reza Pahlevi, mereka sebuah generasi yang mewarisi nilai-nilai revolusi yang sudah tertanam dalam masyarakat.

Akan tetapi generasi ketiga ini tidak serta merta menerima nilai-nilai revolusi itu, mereka selain tidak pernah mengalami penindasan politik rezim Pahlevi, mereka juga tidak pernah berinteraksi dengan Pemimpin Tertinggi Ayatullah Khomeini, sehingga daya rekat doktrin revolusi terhadap generasi ini tidak sekuat generasi sebelumnya. Pada gilirannya, generasi ini jauh lebih kritis serta tidak terlalu terikat dengan doktrin revolusi, disinilah kesenjangan ideologis itu terjadi, mereka melakukan pemberontakan terhadap doktrin revolusi yang mereka anggap telah mengekang nilai-nilai kebebasan yang mereka anut.

Di perkotaan semakin banyak anak muda dari generasi ini baik laki-laki dan perempuan yang memasuki bangku kuliah, kalangan muda perkotaan inilah yang menjadi motor penggerak perubahan demokrasi di Iran, mereka mengambil langkah-langkah moderat namun tetap kritis terhadap rezim yang berkuasa, mereka mengkritik dominasi politik para mullah dalam politik Iran.<sup>30</sup> Mereka menghendaki negara yang lebih toleran dan mendukung terbentuknya demokrasi Islam yang berwajah humanis dan egaliterian.

### **Kebijakan Reformasi**

Setelah Muhammad Khatami menduduki jabatan Presiden, segera ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro liberalisme sesuai dengan janji-janjinya pada saat kampanye. Slogan toleransi, modernisasi dan keterbukaan dijabarkan dengan program pembangunan politik dan ekonomi. Dalam setiap pidatonya Khatami selalu menyerukan kembalinya ke sistem multi partai, membuka kran keterbukaan seluas-luasnya serta membebaskan aktifitas budaya, penelitian dan publikasi dari pembatasan birokrasi dan undang-undang.<sup>31</sup>

Khatami berusaha memenuhi janjinya tersebut dengan membangun pemerintahan berbasis kalangan reformis, kabinet yang dibentuk Khatami mencerminkan kekuatan-kekuatan politik yang menjadi pendukung utama dirinya sebagai presiden, kabinet tersebut mewakili kalangan reformis dan kalangan kiri Islam. Keyakinan Khatami bahwa Islam sangat sesuai dengan demokrasi barat, mendorong dirinya membuka perluasan penerbitan media massa, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dengan mengangkat Massoumeh Ebtekar sebagai salah satu wakil presiden dari perempuan.<sup>32</sup>

Khatami juga mendorong debat publik diberbagai forum tentang toleransi, tertib hukum dan dampak negatif dari penggunaan kekerasan dalam membangun kehidupan berpolitik, ia menekankan bahwa tidak mungkin tujuan politik dicapai dengan cara-cara kekerasan, walaupun di negara Islam seperti Iran. Bahkan kerap kali dalam pidatonya Khatami membedakan antara Islam damai dan Islam kekerasan, dengan penuh simpati Khatami berusaha menyakinkan publik Iran bahwa budaya toleransi adalah sangat penting dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Bambang Cipto Hal 38.

<sup>31</sup> Musthafa Abd. Rahman Hal 21.

<sup>32</sup> Bambang Cipto Hal 61.

<sup>33</sup> Bambang Cipto Hal 62.

Di bawah pemerintahanya media memainkan peran ganda : sebagai sarana komunikasi publik dan media pendidikan politik massal, debat tentang berbagai isu publik berkembang luas dimasyarakat, rakyat Iran dibawah pemerintahan Khatami sangat menikmati belajar berdemokrasi, jumlah media massapun bertambah banyak.<sup>34</sup>

Pencapaian pembangunan politik spektakuler di masa Presiden Khatami adalah diselenggarakannya pemilihan umum di tingkat daerah, karena sejak tahun 1979 hingga 1998 Pemerintah Republik Islam Iran tidak pernah menyelenggarakan pemilihan di tingkat daerah.<sup>35</sup> Walaupun sesungguhnya konstitusi Iran memuat pasal tentang pemilihan anggota dewan perwakilan daerah dan kabupaten. Kubu reformis sangat berharap dengan diselenggarakan pemilihan parlemen di daerah akan membantu proses desentralisasi daerah di seluruh Iran.

### **Reaksi Kaum Konservatif**

Reaksi keras terhadap kebijakan baru Khatami bermunculan, kaum konservatif menyerang Khatami sebagai kepanjangan kapitalisme barat, menurut mereka kebebasan berbicara dan menerbitkan media massa sangat berlebihan serta mengancam ideologi revolusi Islam Iran. Kubu konservatif kemudian mengarahkan sasaran terhadap pilar kekuatan andalan kaum reformis, yakni media massa, lewat Departemen Kehakiman Iran yang dikuasai kalangan konservatif, menuduh media massa telah menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan pemerintah, oleh karena itu tindakan keras dan tegas diperlukan untuk membungkam media-media yang dianggap kontra revolusi.

Pemerintah lewat pasukan khusus (pengawal revolusi) dan basij (pasukan khusus Departemen Dalam Negeri) melakukan tindakan refresif terhadap beberapa media corong kaum reformis tersebut, beberapa koran dan media yang dianggap terlalu liberal langsung ditutup dengan alasan membahayakan eksistensi revolusi Islam Iran. Bahkan didalam parlemen pertarungan antara kaum reformis dan konservatif berlangsung lebih seru dan panas, walaupun mayoritas kursi di Majelis dikuasai oleh kubu reformis dengan 74% kursi dan kubu konservatif hanya menguasai sekitar 26% saja, tapi kalangan garis keras ini walaupun jumlahnya minoritas, kemenangan selalu ada ditangannya, karena setiap keputusan yang dihasilkan oleh parlemen pasti akan dijegal oleh Dewan Pengawal bila dianggap bertentangan dengan revolusi.

### **Kesimpulan**

Peristiwa perubahan politik di Iran pasca kemenangan gerakan revolusi Islam, memberikan gambaran pada kita bahwa pembangunan politik pasca revolusi di Iran, dikemudian hari menuai kritik dari generasi berikutnya, sebuah generasi yang tidak terlibat secara langsung dengan penindasan rezim Pahlevi, mereka sebuah generasi yang lahir ketika pemerintahan Iran sudah dikuasai oleh kalangan para mullah. Mereka menilai bahwa dominasi yang sangat dominan para ulama dalam politik telah membelenggu kebebasan mereka.

Gerakan reformasi di Iran tidak terjadi secara tiba-tiba, awalnya gerakan ini dimulai oleh Khatami, seorang pejabat di dalam tubuh pemerintah Islam Iran, Khatami melakukan pembaharuan dengan membuka kran kebebasan melalui penerbitan buku dan impor film asing, proses transmisi nilai-nilai baru inilah yang kemudian mempengaruhi pola pikir

---

<sup>34</sup> Bambang Cipto Hal 63

<sup>35</sup> Bambang Cipto Hal 64

generasi muda Iran, mereka menemukan kesenjangan antara nilai baru yang mereka peroleh melalui media film dan buku, dengan situasi politik Iran yang mereka rasakan, dimana kebebasan serta demokratisasi tidak mereka temukan.

Proses liberalisme di Iran tidak mudah karena masih dominannya kelompok konservatif yang berada di dalam pemerintahan, walaupun mereka tidak sepenuhnya memegang kendali di lembaga eksekutif dan legislatif, peran pemimpin tertinggi revolusi dan lembaga-lembaga bentukannya senantiasa menjadi penghambat bagi gerakan reformasi, setiap kebijakan yang dibuat eksekutif dan legislatif akan mengalami penolakan jika dinilai tidak selaras dengan ideologi revolusi Islam Iran. Tangan-tangan kekuasaan para mullah akan selalu mengawasi setiap gerak-gerik tokoh-tokoh reformasi, kaum konservatif dengan mudah bisa menggerakkan militer bila kelompok reformasi dinilai membahayakan ideologi revolusi Islam Iran.

Kendati dibanyang-banyangi oleh tindakan refresif dari kaum konservatif, gerakan reformasi Iran telah berhasil meletakkan fondasi-fondasi dasar bagi kekuatan civil society, kemandirian dalam berpikir serta bersikap berbeda dengan penguasa, menjadi harapan baru proses liberalisme ke depan. Kaum konservatif cepat atau lambat akan mengakui kesalahannya, karena proses perubahan itu tidak bisa dihambat apalagi dihentikan, perubahan sudah menjadi hukum besi sejarah yang akan menggulung habis pihak-pihak yang tidak bisa beradaptasi dengannya.

Sejarahlah yang kemudian akan menguji sejauh mana proses liberalisme di Iran akan berakhir ditengah-tengah situasi timur tengah yang saat ini menunjukkan semakin kuatnya semangat akan perubahan dan keterbukaan sistem politik yang lebih demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayat, Asef, *Pos Islamisme*. (Yogyakarta : LkiS, 2011)
- Cipto, Bambang, *“Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami”*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004).
- Dahlan, Muhidin M., *“Sosialisme Religius : Suatu Jalan Keempat?”* (Yogyakarta : Kreasi Wacana 2001).
- Fatah, Eep Saefulloh, *“Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru”*. (Bandung : Mizan, 2000).
- Garaudy, Roger, *“Demi Kaum Tertindas : Akar Revolusi Islam di Iran”*. (Jakarta : Penerbit Citra, 2000).
- Mason, Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit, *PKS dan Kembarannya : Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. (Jakarta : Komunitas Bambu, 2012)
- Maulana, Noor Arif, *“Revolusi Islam Iran Dam Realisasi Vilayat I Faqih”*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2004).
- Musthafa Abd. Rahman, *Iran Pasca Revolusi : Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*. (Jakarta : Buku Kompas, 2003).
- O’Donnell, *“Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian”* (Jakarta : LP3ES, 1993).
- Prasetyo, Eko *“Islam Kiri : Jalan Menuju Revolusi Sosial”*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004).
- Raines, John C. (editor), *“Marx Tentang Agama”*. (Jakarta : Teraju, 2003).
- Rais, Amien (penerj), Dr. Ali Syar’ati, *“Tugas Intelektual Muslim”*. (Yogyakarta : Shalahudin Press, 1995)
- Tibi, Bassam, *Islam dan Islamisme*. (Bandung : Mizan, 2016)